

5.1.2 Management (Pengelolaan).....	84
5.1.3 Connection (Jaringan).....	94
5.1.4 Contribution (Kontribusi)	98
5.2 Upaya Kader Nahdlatul Ulama Menjaga Soliditas Dalam Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2014 di Kota Makassar	105
5.2.1 Memangkas Kisruh Nasional Yang Berdampak Ke Tingkat Kabupaten/Kota.....	105
5.2.2 Memaksimalkan Basis Massa Dengan Meminilmalkan Calon Legislatif	111
BAB VI: Penutup	121
6.1 Kesimpulan.....	121
6.2 Saran	123
Daftar Pustaka	125
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	Persentase Jumlah Warga NU di Indonesia.....	8
2	Persentase Jumlah Warga NU di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.....	9
3	Perolehan Suara NU dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Makassar Tahun 2009.....	13
4	Hasil Pemilu 1955.....	64
5	Perolehan Suara PPP sebelum NU Keluar.....	67
6	Hasil Pemilu 1999.....	69
7	Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD 2014 Di Kota Makassar.....	95
8	Anggota DPRD Kota Makassar 2009 Yang Berasal dari NU.....	100
9	Anggota DPRD Kota Makassar 2014 Yang Berasal dari NU.....	100
10	Anggota DPRD Kota Makassar 2019 Yang Berasal dari NU.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan yang disebut ormas dengan segala bentuknya hadir tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.¹ Peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan Bangsa dan Negara.

Kehadiran organisasi sangat berpengaruh dalam perjalanan politik di tanah air. Salah satu organisasi yang sangat berpengaruh yakni keikutsertaan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perpolitikan tanah air. Ketika organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) oleh Hadratu Syaik Kiai H. Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar, seorang diantara pejuang kemerdekaan Indonesia.² NU kala itu (Prakemerdekaan) menjadi peserta Pemilu di tahun 1955. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Kendala-kendala internal

¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES,1996), hlm. 249-250. Lihat juga Anderee Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 8-12.

² Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 45-46.

pemerintah seperti kembalinya penjajah dan pemberontakan di berbagai daerah, telah menyebabkan pemilu baru bisa dilaksanakan pada 1955 waktu itu Indonesia berusia 10 tahun. NU sendiri sejak tahun 1952 keluar dari Masyumi setelah mempertimbangkan, menganalisis, dan membuat prediksi di kemudian hari tentang eksistensinya sebagai partai politik. Pengalaman dengan Masyumi kurang menggembirakan.

Sejak 1952, NU mempersiapkan proses penguatan partai, ikut dalam kabinet dan merekrut orang-orang yang dibutuhkan untuk bisa membantu Partai NU. Dalam kabinet, sejak 1952-1955 paling tidak ada beberapa kabinet dan NU diantaranya sudah berpartisipasi, yaitu: Kabinet Ali I (30 Juli 1953-12 Agustus 1955), ketika NU menempatkan Zainul Arifin (Waperdam), KH. Masjkur (Menag), dan Moh. Hanafiah (Menteri urusan agrarian). Tetapi Pemilu 1955 sendiri diselenggarakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955- 24 Maret 1956) setelah Kabinet Ali I jatuh.

Hasil pemilu 1955 menunjukkan 5 besar partai politik yang mendapatkan 1 juta ke atas, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan 22,32 % dengan 57 kursi, Masyumi mendapatkan 20,92 % dengan 57 kursi, NU 18,41 % dengan 45 kursi,³ PKI mendapatkan 16,36 % dengan 39 kursi dan PSII mendapatkan 2,89 % dengan 8 kursi. Keberhasilan NU yang mencapai nomor urut ketiga mengejutkan banyak pihak, terutama dari kalangan Masyumi, mantan induk federasi NU.

³ Nur Khalik Ridwan, NU & BANGSA 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan, Ar-Ruzz Media Group, Jogjakarta, 2010, hlm. 126

Mengejutkan karena saat itu NU sering dianggap hanya partai sandal jepit.

Pada tahun 1967-an ini, Indonesia berada dalam pengaruh negara-negara Barat. NU dan partai-partai lain yang berbasis sipil dikala itu, dikerjai dengan cara disederhanakan (*difusi*), dan kebijakan politik yang menguntungkan Golkar karena dikendalikan oleh Soeharto dengan rezim militernya. Sangat banyak kebijakan-kebijakan yang lahir pada periode ini. Pemerintahan Soeharto begitu membawa dampak yang sangat mencekam bagi partai-partai yang berbasis akar rumput seperti NU, PNI, Parmusi, dan lain-lain. Mereka tidak bisa menyapa konstituennya dan yang paling mematikan adalah adanya kematian regenerasi politik, tidak adanya kursus-kursus politik tentang kesadaran rakyat yang dilakukan partai politik, dan ini berarti memperdalam jurang antara rakyat dan partai politik semakin jauh.⁴

Setelah terjadi peristiwa Gestapu (Gerakan September 30), lalu diikuti Gestok (Gerakan 1 Oktober), dan diteruskan pembantaian massal ratusan ribu manusia Indonesia yang dianggap PKI, rezim yang dikonsolidasikan oleh militer lewat pemimpin baru Jenderal Soeharto belum langsung menyelenggarakan pemilu. Sesuai mandat MPRS No. XIII/MPRS 1966 dibentuklah apa yang disebut sebagai Kabinet Ampera (11 Oktober 1967 – 6 Juni 1986) yang dipimpin Soeharto, dan NU

⁴ Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 "Pergulatan Politik & Kekuasaan"*, 2010, hlm. 209

memperoleh posisi sebagai Menkesra (KH. Idham Kholid) dan Menag (KH. Moch. Dahlan).⁵

NU pada pemilu 1971 masih menjadi partai politik dan meneruskan tradisi sejak tahun 1952 dengan tokoh sentralnya, KH. Idham Kholid dan Rais Am KH. Wahab Hasbullah. Pemilu kali ini juga diikuti NU beserta partai-partai yang lain, sejumlah 10 partai. Hasilnya partai NU memperoleh suara 58 kursi. Kemudian pada kurun waktu 1970-1977, partai NU mendobrak beberapa gerakan. Pada periode inilah terjadi fusi partai politik dan konflik beberapa partai kian marak terjadi. Tahun 1973 terjadinya fusi (pendirian PPP) dan pada tahun inilah NU mulai pasang dada di PPP.⁶

Konsekwensi dari adagium politik ini menjadikan NU ditinggalkan oleh elit politiknya dan menelantarkan warganya. Perkembangan aktifitas NU menjadi konstan, NU kecewa terhadap hasil Pemilu 1971. NU merasa bahwa ada intimidasi dan pelibatan militer dari pemerintah Orde Baru untuk memanipulasi hasil Pemilu. Ditengah kekecewaan terhadap hasil pemilu, Ketua PBNU, Idham Chalid diangkat sebagai Ketua DPR/MPR. Pengangkatan Idham Chalid sebagai ketua DPR/MPR menjadikan perpecahan dalam tubuh NU semakin menganga antara kubu Pro Idham yang “tradisional-konservatif” dianggap sangat loyal pada pemerintah dan kubu “tradisional kritis” (Radikal) yang dimotori oleh Zubhan ZE.⁷

⁵ *Ibid*, hlm. 210

⁶ Wawancara dengan Abd. Kadir Ahmad Selaku Kepala Biro UIN Alauddin Makassar, Kamis 07 Maret 2013, Di UIN Alauddin Makassar

⁷ Penggunaan kedua istilah tersebut dikutip dari *Sjadzili, A. Fawaid (Ed)*, 20 Tahun Perjalanan LAKPESDAM: Memberdayakan Warga NU. (Jakarta: Lakpesdam. 2005) hlm 8.

Perseteruan kedua kelompok ini semakin membesar setelah lepasnya jabatan Menteri Agama yang selama ini menjadi “jatah” NU. Dampak perseteruan tersebut menjalar sampai ke daerah termasuk Sulawesi Selatan dan berakibat pada tersingkirnya NU dari PPP, karena tidak solid. Disinilah era kekecewaan NU sampai dua Pemilu berikutnya.

Mukhtamar NU ke-27 1984 di Situbondo bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo asuhan KH. R. As’ad Syamsul Arifin, murid KH. Hasyim Asy’ari yang karismatis. Mukhtamar ini menjadi ajang pertarungan yang keras dalam internal NU.⁸ Dalam khittah NU tersebut menyebutkan salah satunya bahwa Pancasila sebagai asas organisasi dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini sebagai perjuangan final. Pasca khittah ini, NU fokus bergerak dalam bidang-bidang pemberdayaan masyarakat. Barang siapa yang ingin berpolitik, maka tak ada larangan untuk itu demi memenuhi hak individu mereka bagi yang bersyahwat politik.

Kalangan NU, baik yang ada di pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa, terbagi dalam NU kultural terdiri dari para kiai yang berorientasi ke penguatan pesantren dan NU struktural yang berorientasi ke aktifitas organisasi. Kalangan NU Struktural merupakan orang-orang yang masuk dalam kepengurusan organisasi dalam berbagai tingkatan, kalangan inilah yang menjadi elit NU. Para elite ini berasal dari berbagai profesi berbeda yang memberikan warna tersendiri dalam tubuh NU.

⁸ Nur Ridwan Khalik, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2010), hlm. 268

NU kultural dan struktural tetap mempunyai komitmen yang sama dalam menjaga tradisi turun temurun ajaran NU dan nama baik NU. Jika terdapat ada permasalahan, maka permasalahan itu akan di bicarakan dan diselesaikan dalam Forum Halaqah⁹ dan Forum Konfrensi.

Pasca reformasi melahirkan beberapa partai yang dikelola oleh kader sendiri, diantaranya, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKU (Partai Kebangkitan Ummat), Partai Suni, dan PNU (Partai Nahdlatul Ummah). Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berawal pada 30 Mei 1998 ketika diadakan istighosah kubro di Jawa Timur, dan banyak kiai berkumpul di kantor PWNNU Jatim. Mereka mendesak KH. Cholil Bishri supaya menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Undang-undang itu mengatur mengenai: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang itu mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga Negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan

⁹ Halaqah: Pendidikan (Sekelompok kecil Muslim yang secara rutin mengkaji ajaran Islam).

memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Sejak zaman prakemerdekaan, NU sebagai basis organisasi kaum tradisional Islam Indonesia yang terdiri atas para Kyai dan santri di Jawa telah memainkan peran yang sangat penting dalam menyusun barisan anti penjajahan.

NU sebagai salah satu organisasi besar dan sangat berpengaruh baik secara lokal (kedaerahan), Nasional, maupun Internasional. Adanya persentase dari jumlah orang-orang NU di Indonesia membuktikan bahwa NU adalah sebuah organisasi yang sangat diperhitungkan dalam ranah politik di tanah air. Jumlah warga NU menggunakan data survey ISNU sebagaimana disampaikan oleh Pengurus Koperasi MabadiKu PWNU Jawa Timur yaitu 83 juta jiwa. Maka persentase *nahdliyyin* adalah 32,72% atau dibulatkan menjadi 33 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, bila menggunakan data terbaru Biro Sensus AS.

Sementara bila tetap menggunakan data BPS 2010, diperoleh 34,92% atau 35 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan total jumlah umat Islam, maka jumlah warga

nahdliyyin hanya berkisar 40% dari total jumlah umat Islam Indonesia. Artinya masih ada sekitar 60% atau 207.176.162 - 83 juta = 124.176.162 umat Islam Indonesia yang bukan warga NU, dan itu tersebar diberbagai kelompok-kelompok umat Islam lainnya. Data ini dibuktikan dalam jumlah keseluruhan ummat Islam yang ada di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Muslim atau ummat Islam di Indonesia adalah 207.176.162 jiwa.¹⁰ Sedangkan *Wikipedia* menyebutkan bahwa umat Islam berjumlah sekitar 85,2% atau 199.959.285 jiwa dari total 234.693.997 jiwa penduduk.¹¹

Table 1. Persentase Jumlah Warga NU di Indonesia

Data Survey	Persentase
ISNU (Pengurus Koperasi MabadiKu PWNNU Jawa Timur)	83 juta jiwa (32,72%)
BPS (2010)	40%
Wikipedia 2019 (Esposito, John (2013). <i>Oxford Handbook of Islam and Politics</i>)	Lebih dari 108 Juta jiwa

(Sumber, Data BPS 2010. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> dan http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia)

Menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS), jumlah warga Sulawesi Selatan tahun 2015 mencapai 8.520.304 jiwa, ada kenaikan

¹⁰ <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia

dari jumlah sebelumnya di tahun 2014 sekitar 8.432.163 jiwa.¹² Perkiraan warga NU dari data tersebut menurut Lembaga Riset NU sekitar 40% atau 3.408.121,6 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk masyarakat yang tidak termasuk sebagai anggota NU namun mempraktekkan tradisi ke NU-an seperti *barzanji*, *kunut* dan lain-lain.

Table 2. Persentase Jumlah Warga NU di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar

Data Survey	Tahun	Persentase
Lembaga RisetNU Sulawesi Selatan	2015	40% atau 3.408.121,6 jiwa
NU Kota Makassar	2019	51%

(Sumber, Data 2015 dan 2019 dari Lembaga RisetNU Sulawesi Selatan dan DPC NU Kota Makassar)

Kehadiran NU di Sulawesi Selatan dapat ditelusuri ke beberapa fase berbeda, baik secara kultural maupun organisasional sesuai dengan tokoh, ajaran yang dibawa, dan pengaruhnya di berbagai daerah.¹³ Sekitar abad ke-17 atau 18, seorang Mursyid bernama Syaikh Yusuf yang juga salah seorang murid Datuk Ribandang membawa dan menyebarkan NU di Nusantara termasuk Sulawesi.

¹² <http://sulsel.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/84>

¹³ Wawancara dengan Pemuda NU Ahmad Arfah, Pada Tanggal 12 Januari 2015.

NU di Sulawesi hadir pada dasarnya sudah membawa kepentingan politik pada tahun 1953. Pada dasarnya NU di Sulawesi itu elitis.¹⁴ Peran politik yang dijalankan NU bukan politik praktis melainkan politik kebangsaan¹⁵, politik dalam ranah etis, moral dan norma. Sejarah NU menunjukkan bahwa NU selalu berkelindan dengan politik. Kini NU telah terseret ke arus politik praktis, dukung-mendukung, yang pada akhirnya justru mendelegitimasi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

KH Ahmad Bone (wafat 12 februari 1972 dalam usia 102 tahun), terpilih sebagai Ketua NU pertama di Sulawesi Selatan. Beliau pada masanya memusatkan pengajian Aswaja dan merekrut jamaah NU di daerah Bugis bersama Andi Mappanyukki. KH. Muhammad Ramli bersama Andi Jemma memusatkan dakwah Aswaja di daerah Luwu. Puang Ramma sebagai wakil Ketua NU di zaman itu, memusatkan dakwah di Kabupaten Gowa dan Makassar.

Puang Ramma sejak tahun 1961 sebagai Qadhi Gowa, yang sebelumnya yakni 1956-1959 bersama KH. Muh Ramli mewakili NU sebagai Dewan Konstituante di Bandung. Saat menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, KH. Muhammad Ramli wafat pada 3 Februari 1958 di Bandung, dan dimakamkan di Pemakaman Arab, Bontoala, Makassar. Sepeninggal ulama NU ini, Puang Ramma tetap di dewan dan

¹⁴ Wawancara dengan Sapriillah, Penulis dan peneliti dari Litbang Makassar, Pada Kamis 07 Januari 2015 Melalui Salah Satu Media Sosial

¹⁵ Wawancara dengan H. Kaswad Sartono, Ketua NU Makassar Periode 2019-2024, Pada Kamis 19 Mei 2022, di UIN Alauddin Makassar

menjalankan tugas sampai akhir periode, selanjutnya Puang Ramma mewakili NU di DPRD Sulawesi Selatan.

Sejak Muktamar NU ke-27 Situbondo, yang menetapkan bahwa NU kembali ke khittah 1926, Puang Ramma, tidak lagi menjadi anggota dewan, namun tetap berkonsentrasi pada pengkhidmatan NU, sampai akhirnya Puang Ramma dipercaya menjadi Wakil Ketua NU Sulsel tahun 1977-1982, selanjutnya menjabat Mustasyar PWNU Sulawesi Selatan sampai akhir hayatnya.

Memasuki tahun 1982, AGH Sanusi Baco sebagai Rois Syuriah NU Sulawesi Selatan, lebih aktif mengembangkan sayap NU di daerah ini, di dampingi Ketua Tanfizdiyah, KH Abdurrahman B (1982-1987), KH Abd Rahman K (1987-2002), H Harifuddin Cawidu (2002-2005), KH Zein Irwanto (2006-2013) dan Prof. Dr. H. Iskandar Idy (2013-2019).

Struktur kepengurusan NU di Sulawesi Selatan, pada awal terbentuknya sampai sekarang mencerminkan konfigurasi sosial masyarakat Bugis-Makassar, dengan empat pilarnya, yakni to panrita (ulama), to sugi (pengusaha), to acca (cendekiawan), to warani (kaum bangsawan dan anak muda). Keempat pilar ini dihimpun dalam jajaran pengurus dan karena kekuatan massa yang dimilikinya.

Pemilihan Presiden tahun 2009, NU tidak punya kekuatan untuk ikut menjadi penentu kepemimpinan Nasional. NU hanya jadi justivikator

proses politik.¹⁶ NU harus kembali memainkan peran strategis di politik etis. Namun, ada beberapa hal yang mesti dilakukan yakni, menjaga independensi, mempertajam visi dan pengabdian di bidang sosial dan keagamaan serta meningkatkan sumber daya manusia NU. Apabila semua itu kuat, NU ke depan akan sangat didengar dan jadi panutan, termasuk oleh pengambil kebijakan.

Pemilihan anggota DPRD di Kota Makassar juga telah membuktikan tingkat partisipasi NU dalam memainkan peranannya dalam politik praktis. Pemilihan anggota DPRD tahun 2009 misalnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi NU tahun tersebut sangat menurun. Terbukti dari hasil perolehan suara yang diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) salah satu partai besar NU hanya memperoleh 1,13%¹⁷ suara dari total keseluruhan perolehan suara tiap daerah pilihan. Hal ini membuktikan bahwa PKB tidak mendapatkan kursi sebab suara parpolnya tidak mencapai angka bilangan pembagi pemilih (BPP). Namun pada pemilu 2009 itu, NU tidak saja berkumpul pada satu partai tunggal yang menjadi tolak ukur partai yang berasaskan NU tersebut. Tetapi NU tersebar diberbagai partai salah satunya PPP, GOLKAR yang masing-masing berhasil memperoleh 3 kursi (PPP) dan 11 kursi untuk GOLKAR¹⁸.

¹⁶ Ali Masykur dalam bedah buku karyanya yang bertajuk "NU dan Moralitas Politik Bangsa" di arena Muktamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudiang Makassar.

¹⁷ Data Perolehan Suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu DPRD Kota Makassar Tahun 2009

¹⁸ Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar dari perolehan kursi parpol pemilu DPRD Kota Makassar.

atmosfernya menjadi panas, persahabatan, pertemanan, persaudaraan, dan lain seterusnya antarsesama pengurus NU akan mulai hilang. Akibatnya, ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) seperti *tawassuth*¹⁹, *tawazul*²⁰, *tasamuh*²¹, *l'tidal*, dan lain seterusnya menjadi barang langka untuk dihidupkan. Hal inilah yang mengakibatkan partai besar NU seperti PKB lagi-lagi tidak mendapatkan kursi karena hanya mencapai suara sah sebanyak 19,051 atau 3,13% dari total perolehan suara di tiap dapil²².

Hasil diatas memberikan renungan tersendiri dikalangan NU. Suara rakyat jangan sampai menjadi suara pribadi dan ketika orang-orang NU terjun ke politik praktis, jangan sampai lupa ingatan.²³ Apabila ada sejumlah pengurus NU yang ingin bermain politik praktis, berhentilah menjadi pengurus NU secara definitif dan silahkan aktif di partai politik. Sebab, sikap itu lebih bijak sehingga NU tidak dikesankan dipolitisasi. Masyarakat nahdliyin pun tidak terseret masuk gelanggang politik praktis. Inilah yang sangat disesalkan oleh sebagian masyarakat nahdliyin.

Organisasi NU di Kota Makassar bukanlah sebuah kelompok yang mampu menciptakan rasa soliditas begitu saja. Sebuah tim, sekuat dan sebagus apapun potensi masing-masing individu yang menjadi anggotanya tentu memerlukan waktu yang cukup agar mereka bisa

¹⁹ Tawassuth dan l'tidal adalah suatu sifat keberagaman yang tidak terjebak pada titik – titik ekstrem. Sikap yang mampu menjemput setiap kebaikan dari berbagai kelompok.

²⁰ Tawassul adalah berdoa kepada Allah melalui suatu perantara, baik perantara tersebut berupa amal baik kita ataupun melalui orang sholeh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah.

²¹ Tasammuh adalah sebuah sikap keberagaman dan kemasyarakatan yang beragam.

²² Ibid

²³ Wawancara dengan Rois Surya NU Sulsel, Tanggal 17 Februari 2016 di Kediamaanya

bekerjasama dengan baik. Terbukti pada tahun 2014 lalu NU terpecah dikarenakan para elit, aktor, dan tim sukses yang ikut dalam meramaikan pemilihan calon anggota DPRD bersaing dengan saling menjelek-jelekkkan satu sama lain untuk menjatuhkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tema ini karena secara ideal NU adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak melakukan aktifitas politik sesuai dengan Khittah NU 1984 bahwa “Pancasila sebagai asas organisasi dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini sebagai perjuangan final”.²⁴ Pasca khittah ini, NU fokus bergerak dalam bidang-bidang pemberdayaan masyarakat. Barang siapa yang ingin berpolitik, maka tak ada larangan untuk itu demi memenuhi hak individu mereka bagi yang bersyahwat politik. Akan tetapi di sisi lain malah justru aktifitasnya lebih cenderung ke aktifitas politik. Dari paparan diatas penulis bermaksud untuk mengambil judul: **Soliditas Kader Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2014 Di Kota Makassar.**

²⁴ Nahdlatul Ulama, *Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Maret 2010, hlm. 46

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana soliditas kader Nahdlatul Ulama dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 di Kota Makassar?
2. Bagaimana upaya kader Nahdlatul Ulama menjaga soliditas dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menganalisis soliditas kader Nahdlatul Ulama dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 di Kota Makassar
2. Menganalisis upaya yang dilakukan kader Nahdlatul Ulama untuk menjaga soliditas dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian mengenai Soliditas Kader Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2014 di Kota Makassar. Penelitian ini juga memiliki sejumlah manfaat secara teoritis dalam studi politik.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia perpolitikan Nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rujukan kepada masyarakat khususnya masyarakat nahdliyin, kader NU dan para elit NU untuk menjaga kesolidan dalam membangun organisasi NU yang lebih baik dan tetap dalam koridor syariat islam yang di bawa oleh ulama terdahulu.
2. Memberikan motivasi bagi kader NU untuk memperkuat dan menjaga soliditas NU yang ada di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai konsep kelompok kepentingan dan konsep soliditas organisasi untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang konsep atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian dalam tesis ini. Kedua hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

2.1 Kepentingan Politik

Politik tidak dapat dipisahkan dari sebuah kepentingan. Namun demikian, politik menurut sebagian orang berbeda dengan kepentingan. Karena kepentingan tidak selalu disangkutpautkan dengan politik. Kepentingan untuk memperoleh dukungan, simpati publik, jabatan dan kekuasaan, sehingga hanya mengedepankan aspek keuntungan individual atau kelompok saja adalah kelompok kepentingan yang buruk. Sedangkan kepentingan yang berbasis pada upaya mewujudkan masyarakat dan bangsa yang lebih baik merupakan politik kepentingan yang baik. Karenanya, kepentingan yang diusung dalam berpolitik haruslah mengarah pada kepentingan yang dimaksudkan demi terwujudnya kebaikan bersama. Kepentingan ini dalam bahasa lain disebut sebagai kepentingan nasional.

Menjaga kelangsungan hidup suatu negara, maka negara harus memenuhi kepentingan nasionalnya, sehingga negara dapat berjalan

dengan stabil dan tetap survive. Kehidupan masyarakat dalam demokrasi memang tak terlepas dari keikutsertaan dalam kontestasi politik. Kekisruhan politik di pentas panggung demokrasi, malah menimbulkan pertikaian dikalangan masyarakat, para anggota partai, dan organisasi. Permusuhan, terror, intimidasi bahkan pembunuhan kerap terjadi antar para pendukung.²⁵

Para politisi ditanah air seolah telah menjadi penganut prinsip politik tanpa etika dan hukum, yang hanya berbicara soal bagaimana memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan politiknya. Jika kekuasaan menjadi kata kunci dari politik, maka tidak heran jika politik sarat dengan gonjang-ganjing karena banyak kepentingan yang bertemu. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan politik yang sebenarnya, yang seharusnya lebih dekat dengan pemahaman Aristoteles, yakni politik (negara) hanyalah untuk “kebaikan” bersama (Fadil, 2012:3), sehingga diakui bahwa manusia sulit memisahkan diri dari kepentingannya, hingga saat dia berkelompok pun akan sulit memisahkan diri dari kepentingan politik kelompoknya.

2.1.1 Konsep Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan dapat didefinisikan sebagai kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha memengaruhi pemerintahan (Janda, Berry, & Goldman, 1997). Kelompok kepentingan adalah organisasi swasta yang berusaha memengaruhi

²⁵ Nur Rohim Yunus, “Kepentingan Politik Itu Tak Abadi”, ‘Adalah; Buletin Hukum & Keadilan, Volume 2 Nomor 3e (2018).

kebijakan publik dan berusaha memengaruhi perilaku pembuat keputusan politik. Akibatnya, kelompok-kelompok kepentingan sering disebut sebagai kelompok penekan (*pressure group*) karena upaya mereka untuk memberi tekanan dalam rangka mempromosikan agendanya.

Istilah *kelompok kepentingan* mencakup setiap kelompok orang yang berusaha memengaruhi pemerintah. David Truman (1951) mendefinisikan kelompok kepentingan sebagai “kelompok dengan sikap bersama yang membuat klaim tertentu atas kelompok lain dalam masyarakat” (h.37) dengan bertindak melalui institusi pemerintah.²⁶

Beberapa kelompok kepentingan bersifat temporer; sebagian lainnya adalah kelompok permanen. Beberapa dari mereka fokus untuk memengaruhi kebijakan tertentu, sebagian lainnya ingin membuat perubahan besar. Beberapa kelompok bekerja melalui agensi administrasi atau eksekutif, yang lainnya melalui sektor yudisial atau legislatif, dan sebagian lagi melalui opini publik.

Kelompok kepentingan (*interest group*) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok penekan (*pressure group*). Kelompok kepentingan, sesuai dengan namanya memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan

²⁶ Stephen Sussman, Barry University, “Kelompok Kepentingan Dan Pluralisme”, Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21, Jilid 2, hal.1207.

yang menampung kepentingan kelompok. Jadi ia lebih berorientasi kepada proses perumusan kebijakan umum yang dibuat pemerintah. Berdasarkan jenis kegiatannya kelompok kepentingan ini dikenal berbagai macam contohnya, seperti profesi, keagamaan, hobi, lingkungan hidup kepemudaan dan lain-lain. Berdasarkan jenis lingkungan kepentingan yang diartikulasikan, dikenal adanya kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan terbatas, seperti, guru, pegawai negeri dll, tetapi ada pula yang memperjuangkan kepentingan luas seperti, lembaga bantuan hukum atau yayasan lembaga konsumen.

Menurut Deden Fathurrohman dan Wawan Sobri bahwa sebuah kepentingan, berarti minat dan aspirasi individu secara sadar tentang sesuatu hal, yang didasari oleh berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Secara riil kepentingan itu sangat bervariasi dan jumlahnya sangat banyak. Secara mudah berbagai kepentingan yang muncul, bisa dilihat dari keberadaan kelompok kepentingan yang jumlahnya banyak dan bervariasi.²⁷

Surbakti juga mendefinisikan bahwa kelompok kepentingan ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dari atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dari mencapai tujuan. sedangkan Almond (dalam Fathurrohman & Sobri, 2002: 165) bahwa kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang

²⁷ Wawan Sobri, 2002, hal. 163

berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik.²⁸

Berdasarkan gaya dan metode mengajukan kepentingan, Gabriel Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi empat tipe, antara lain:

1. Kelompok kepentingan anomik, yang mengajukan kepentingan secara spontan dan berorientasi pada tindakan segera.
2. Kelompok kepentingan non-asosiasi, yang terbentuk apabila terdapat kepentingan yang sama untuk diperjuangkan (kegiatan bersifat temporer).
3. Kelompok kepentingan institusional, yakni suatu kelompok kepentingan yang muncul di dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang fungsinya bukan mengartikulasikan kepentingan, seperti kelompok tertentu di dalam angkatan bersenjata, birokrasi dan partai politik.
4. Kelompok kepentingan asosiasional, yang secara khusus berfungsi mengartikulasikan kepentingan kelompok.

Kelompok kepentingan atau kelompok pengaruh adalah sebuah asosiasi terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan atau aksi-aksi dari pemerintahan. Kelompok-kelompok kepentingan berbeda dari partai-partai politik dalam hal-hal berikut:

²⁸ Surbakti, 1992, hal. 109

1. Mereka berusaha untuk memberi pengaruh dari luar daripada memenangkan atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
2. Mereka secara khas memiliki sebuah fokus isu yang sempit, di mana mereka biasanya berfokus pada sebuah tujuan yang spesifik atau kepentingan-kepentingan dari sebuah kelompok tertentu.
3. Mereka jarang memiliki ciri-ciri programik atau ideologis yang luas yang umumnya terlihat pada partai-partai politik. Kelompok-kelompok kepentingan dibedakan dari gerakan-gerakan sosial oleh derajat organisasi formal mereka yang lebih besar.

Berdasarkan definisi-definisi kelompok kepentingan yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli diatas, maka menurut penulis bahwa kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang berasal dari berbagai latarbelakang yang berbeda namun memiliki kesamaan baik sikap dan tujuan dalam memperoleh sesuatu untuk kepentingan organisasi atau lembaganya dengan melakukan pengaruh terhadap sebuah pemerintahan atau kebijakan.

Konsep kepentingan ini sangat penting dalam penelitian ini, sebab dalam penelitian ini penulis akan berpusat pada kepentingan politik salah satu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang terbesar di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Kader Nahdlatul Ulama dalam

menjalankan politik kebangsaannya sudah tentu pasti memiliki kepentingan dibalik keikutsertaannya dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 di Kota Makassar. Untuk itulah penulis menggunakan konsep ini agar lebih memudahkan penulis dalam meneliti.

2.2 Konsep Soliditas Organisasi

Soliditas secara bahasa diartikan sebagai kekompakan dan atau bersatu dalam mewujudkan satu tujuan yang sama.²⁹ Istilah soliditas atau biasa disebut kohesi di dalam konteks akademis ilmu politik telah dikembangkan dalam beberapa pengertian dan kerangka kerja. Beberapa kalangan dalam dunia akademis telah membahas fenomena soliditas organisasi dan partai politik secara mendalam. Dari penjelasan mereka terlihat bahwa tidak ada penjelasan atau faktor tunggal dibalik persoalan itu. Pengkajian mendalam masalah ini diharapkan dapat menjelaskan berbagai persoalan dibalik munculnya masalah soliditas dalam sebuah organisasi besar.

Soliditas organisasi sangat erat kaitannya dengan perpecahan yang terjadi antara kader-kader, elit, atau struktural organisasi itu sendiri. Di dalam konteks partai politik, kajian Lewis Fickett tentang perpecahan memperlihatkan adanya perbedaan dalam pemahaman ideologi dan kehadiran konflik personal di antara elit adalah akar-akar utama perpecahan sebuah organisasi dan atau partai. Fickett menunjukkan

²⁹ Depdiknas, 2009 dalam Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2012

bahwa perpecahan akan tetap menjadi masalah yang tidak terselesaikan sepanjang masalah-masalah dasar ini tidak secara tepat ditangani.³⁰

Kaitannya dengan peran ideologi, Daniel Bell dan Bernard Shaw menyatakan bahwa walaupun ideologi kadang-kadang digunakan untuk menyembunyikan atau menutupi ambisi pribadi sebagai sumber utama terjadinya konflik, peranan utama ideologi inilah yang ada dibalik gejolak soliditas organisasi.³¹

Sejumlah pakar memfokuskan pembahasan mengenai kohesi atau soliditas partai dengan menyoroti perilaku memilih anggota partai di parlemen. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berupaya menggambarkan dan menganalisa masalah soliditas yang terjadi pada kader-kader organisasi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan kepentingan organisasi atau partai yang bercorak NU atau kader yang berada pada suatu partai dalam menjalankan kepentingannya di badan legislatif, terutama kekonsistenan pada saat pemungutan suara.

Sejumlah akademisi juga telah menyampaikan pandangannya terkait latar belakang terciptanya soliditas organisasi. Menurut Mahendra Singh, secara umum, ada dua faktor yang menjelaskan mengapa organisasi bersifat solid (kohesif), yaitu faktor-faktor internal yang berada

³⁰ Lewis P. Fickett, Jr., *The Major Socialist Parties of India: A Study in Leftist Fragmentation, Foreign and Comparative Studies*, (New York: Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Syracuse University, 1976).

³¹ David S. Bell dan Eric Show (eds.), *Conflict and Cohesion in Western European Social Democratic Parties*, (London: Pinter Publisher 1994), 175.

dalam organisasi tersebut dan faktor eksternal seperti situasi sosio-kultural dan sistem politik tempat organisasi itu eksis.³²

Soliditas adalah modal dasar yang sangat penting dalam sebuah tim. Ibarat sebuah bangunan dalam sebuah gedung, soliditas layaknya fondasi yang menentukan seberapa kuat sebuah gedung bisa ditinggikan dan seberapa besar beban yang bisa ditanggung oleh gedung tersebut. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibangun untuk membentuk sebuah tim yang hebat adalah kekompakan atau soliditas dalam sebuah tim.

Sebagaimana sebuah organisasi, maka ia terdiri dari berbagai individu yang bergabung, bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Dari sinilah mengapa soliditas atau kekompakan menjadi kunci keberhasilan sebuah tim kerja. Karena individu yang bergabung kemudian bekerjasama tentu perlu menyamakan persepsi dan perasaan agar proses kerjasama bisa berjalan dengan lancar dan tujuan bisa tercapai dengan cara yang terbaik. Proses inilah yang kemudian biasa disebut dengan istilah membangun tim (team building). Proses ini adalah tahapan paling krusial, karena kekompakan adalah sesuatu yang sangat sering kita dengar tapi sulit untuk diaplikasikan dan jarang kita temukan.

Sebuah kelompok yang solid tentunya tidak terbentuk begitu saja. Sebuah tim, sekuat dan sebagus apapun potensi masing-masing individu yang menjadi anggotanya tentu memerlukan waktu yang cukup agar

³² Mahendra P. Singh, *Cohesion in Predominant Party: The Pradesh Congress and Party Politics in Bihar*, (New Delhi: S. Chand & Co (Pvt) LTD, 1975), 12-19.

mereka bisa bekerjasama dengan baik. Oleh karena itu menurut Bruce Tuckman sebuah tim juga memiliki fase-fase yang harus dilewati untuk menjadi tim yang hebat. Fase-fase itu adalah Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning³³. Fase-fase ini tentu adalah pola umum yang biasa terjadi pada sebuah tim.

- a. *Forming* (pembentukan), sebuah kelompok terbentuk karena memiliki tujuan yang sama. Tujuan adalah satu prasyarat utama kenapa sebuah kelompok terbentuk. Dalam arti lain tujuan ini mungkin bisa diwakili oleh kepentingan. Sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama pasti secara alami akan memiliki rasa soliditas dan persamaan sehingga bisa selanjutnya terbentuk menjadi sebuah kelompok. Namun sekedar tujuan atau kepentingan tidak menjamin sebuah kelompok akan berjalan dengan baik. Karena fase kedua pasti akan dilalui, yaitu storming.
- b. *Storming* (badai/ujian) adalah fase kedua yang harus dilalui. Setiap kelompok pasti akan diuji dari segi persamaan kepentingannya. Konflik mulai terjadi dan ada perselisihan. Hal ini terjadi karena masing-masing individu memiliki latar belakang, persepsi, cara kerja dan kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan memicu konflik, sehingga secara alamiah

³³djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13399/Membangun-Tim-Kerja-Efektif-Dalam-Aksi-Peningkatan-Pelayanan-Publik.html di akses pada hari Rabu, 02 Maret 2016, Pukul 16.11 Wita.

akan terasa kebutuhan terhadap standar, aturan dan kesepakatan dalam melakukan sesuatu.

- c. *Norming* (pembentukan norma-norma/aturan). Untuk mencapai fase ini komunikasi dan saling memahami antar anggota tim sangatlah penting.
- d. *Performing* (pelaksanaan). Dengan adanya tata tertib dan peraturan yang telah dikembangkan, maka akan lebih mudah bagi anggota kelompok untuk berkonsentrasi pada pencapaian tujuan bersama. Ini akan berdampak pada keberhasilan tim dalam mencapai tujuannya. Pada fase ini, mereka masih termotivasi dan memahami tugasnya, namun anggota tim kini telah kompeten, otonom dan mampu melakukan proses pengambilan keputusan tanpa pengawasan. Perbedaan pendapat dimungkinkan terjadi sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang disepakati tim. Tim akan membuat keputusan-keputusan yang diperlukan. Bahkan tim yang berkinerja paling bagus akan bisa melakukan evaluasi dalam setiap tahapan yang telah dilaluinya, dan bisa melakukan revisi. Misalnya perubahan dalam hal kepemimpinan dapat membuat tim kembali ke fase *storming*, karena pemimpin baru tidak setuju dengan tata tertib yang sudah disepakati dan adanya dinamika dari tim.

e. *Adjourning* (penghentian sementara). Tuckman pada tahun 1977 bersama dengan Mary menambahkan tahap kelima dari empat tahap pembentukan tim, yakni penghentian sementara (*adjourning*). Hal ini mencakup penyelesaian tugas dan mengistirahatkan tim. Sifatnya bisa sementara jika tim masih akan diperlukan lagi.

Fase-fase tersebut diatas dapat dilalui jika mendapat dukungan penuh dari sebuah tim. Namun untuk menjadi tim yang lebih hebat, sebuah kelompok memerlukan beberapa pendukung lain agar mereka bisa menjadi tim yang besar. Diantaranya adalah hal-hal berikut ini:

- *Clear Goals* (tujuan yang jelas)
- *Contribution* (Kontribusi yang jelas dari masing-masing anggotanya)
- *Connection* (Koneksi/jaringan yang luas)
- *Change Management* (Manajemen Perubahan)
- *Commitment* (Komitmen)
- *Conflict Management* (Manajemen Konflik)
- *Communication* (komunikasi yang efektif)
- *Cooperation* (kerjasama)

Apabila kedelapan item ini ada dalam sebuah tim, maka tim tersebut akan menjadi tim yang sangat hebat.³⁴ Membangun sebuah institusi sama halnya dengan membangun rumah atau bangunan lainnya. Untuk membangun rumah, maka harus dilakukan dengan menggunakan komponen-komponen yang cocok dan berkualitas serta antara satu komponen dengan lainnya harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Ukuran atau takaran antara satu komponen dengan lainnya juga harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka akan menyebabkan ikatan atau rekatan dalam bangunan tersebut tidak akan tahan lama dan cepat aus atau rusak.

Kerangka dalam membangun institusi haruslah tepat dalam menentukan orang. Hal ini menjadi sangat mendasar bagi pengembangan institusi yang harus cocok dan relevan. Antara satu komponen dengan lainnya juga harus sesuai dan saling terkait. Maka organisasi yang maju pastilah didalamnya terdapat ikatan di antara elemen institusi yang saling mendukung dan menguatkan.

Meskipun hanya sekedar mengkiyaskan tidak ada salahnya jika dinyatakan bahwa di dalam membangun institusi itu sama dengan membangun persaudaraan. Di dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa antara sesama mu'min itu seperti bangunan antara yang satu dan yang lain saling mendukung. *Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasyuddu*

³⁴ Mahendra Singh dalam Firman Noor "Perpecahan dan Soliditas Partai Islam Di Indonesia", LIPI Press, Jakarta: 2015.

*ba'dhuhu ba'dhon*³⁵. Memang persaudaraan yang sesungguhnya itu seperti bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan atau saling meneguhkan. Agar saling mengokohkan, maka dipersyaratkan adanya unsur yang saling menguatkan.

Unsur yang saling bertentangan pastilah tidak akan saling mengaitkan antara satu dengan lainnya. Di dalam membangun sebuah institusi, maka tentunya juga harus ada kesamaan prinsip yaitu kesamaan visi dan misi yang akan dicapai. Mengapa harus memiliki visi yang sama. Ya karena kesamaan visi akan menentukan kesamaan langkah dalam menggapai tujuan bersama. Institusi macam apapun akan mencapai tujuan yang diinginkan jika para pendukungnya memiliki kesamaan langkah dalam mencapai tujuan bersama.

Soliditas kelompok merupakan variabel yang sangat penting dalam mengembangkan institusi. Para pelaku di dalam institusi bisa datang dari mana saja. Bisa dari organisasi yang berbeda. Bisa datang dari latar belakang suku, etnis, dan ras yang berbeda. Bisa datang dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Bisa datang dari latar kultural yang berbeda. Akan tetapi ketika mereka masuk dalam kawasan institusi yang sama, maka semuanya harus menyatu dalam satu langkah, satu ayunan.

Sebagai individu yang menjual jasa kependidikan, maka sudah sewajarnya jika semua energi dan kekuatan dikerahkan untuk

³⁵ *Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasyuddu ba'dhuhu ba'dhon* (Persaudaraan yang sesungguhnya itu seperti bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan atau saling meneguhkan).

mengembangkan institusi yang digelutinya. Oleh karena itu, maka puncak dari keberhasilan hanya akan dicapai manakala di dalam institusi tersebut terdapat soliditas kelompok. Kelompok yang solid merupakan kekuatan yang saling meneguhkan. Seperti hadits Nabi Muhammad saw, ia akan seperti sebuah bangunan yang akan saling menguatkan.

Berdasarkan penjelasan para ahli tentang soliditas, maka penulis menyimpulkan bahwa soliditas merupakan kekompakan (sifat) yang sangat mendasar dan harus ada dalam membangun sebuah tim atau organisasi. Soliditas tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk sebuah tujuan yang jelas, memberikan kontribusi terbaik, memperluas jaringan, membuat management perubahan dalam mengevaluasi hasil kerja, berkomitmen, adanya management konflik yang juga sangat penting dalam sebuah tim untuk dapat menetralsir kemungkinan konflik yang akan terjadi antar anggota tim, membangun komunikasi yang efektif antar semua anggota dan bekerja sama dengan baik demi meraih tujuan yang sama.

Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran strategis dalam ikut menentukan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kebesaran ini tentu harus didukung dengan kokoh dan terjalannya konsolidasi organisasi di internal NU. Soliditas organisasi menjadi sebuah keniscayaan karena tantangan zaman saat ini kian beragam. Banyak pihak yang ingin menghancurkan Indonesia dengan berbagai macam

cara. Di antaranya adalah dengan berusaha mengganti ideologi negara dan menyingkirkan NU sebagai organisasi yang paling gigih mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa.

2.3 Teori Neoinstitusionalisme

Neoinstitusionalisme, yang juga dikenal sebagai institusionalisme baru, adalah salah satu dari pendekatan metodologi dalam ilmu-ilmu politik di Amerika Serikat semenjak akhir 1980-an. Metodologi ini khususnya populer di kalangan sarjana ilmu politik Amerika Serikat, meskipun berkembang dalam pengaruh bidang-bidang politik perbandingan dan hubungan internasional. Institusionalisme baru mengombinasikan minat dan perhatian para sarjana tradisional dalam mempelajari aturan-aturan dan struktur-struktur formal institusional dengan penelitian dari para ahli behavioralis dalam mempelajari Tindakan-tindakan para aktor politik individual. Institusionalisme baru mengeksplorasi bagaimana struktur, aturan, norma, dan kebudayaan institusi menghambat pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan individu tatkala mereka merupakan bagian dari suatu institusi politik.

Miller (1995, hlm.6) "Perspektif neo-institusionalis mengombinasikan kajian level mikro terhadap perilaku individu dengan penelitian level makro untuk memahami faktor-faktor institusional yang

membantu membentuk perilaku”.³⁶ Institusionalisme baru adalah metodologi post-behavioral yang paling berpengaruh sekarang ini di kalangan para ilmuwan politik dan Amerika Serikat dan di luar negeri. Pendekatan institusionalis baru memiliki akarnya pada awal hingga pertengahan 1980-an. kerap dipandang sebagai dua pendiri terkemuka pendekatan institusionalisme baru, James G. March and Johan P. Olsen, menerbitkan suatu tulisan yang amat berpengaruh dalam *The American Political Science Review* pada 1984 berjudul “The New Institutionalism: Organizational Factor in Political Life,” yang kemudian diikuti oleh terbitnya buku pada 1989 berjudul, *Rediscovering Institutions*. Mereka mendukung perlunya analisis institusional yang lebih jauh dalam karya mereka yang terbit 1995, *Democratic Governance*.

Merujuk pada apa yang terjadi dikalangan para ahli di akhir 1980 dan sepanjang 1990-an, Barry Weingast (2002) menyatakan, “Ilmu politik menyaksikan revolusi dalam kajian institusi” (hlm. 660). Analisis institusional digunakan untuk mengkaji segala sesuatu dari proses legislatif, efek terhadap gerakan sosial, sampai ke politik hukum dan peradilan.

Berdasarkan pemaparan Miller diatas yang kemudian dirujuk pada penelitian soliditas kader Nahdlatul Ulama dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 di Kota Makassar, bahwa sebuah Institusi dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni secara makro dan mikro yang dimana

³⁶ Miller, M.C. (1995). *The high priests of American politics. The role of lawyers in American political institutions*. Knoxville: University of Tennessee Press.

1. *Institusionalisme Pilihan Rasional*

Pendekatan populer dalam arus ini adalah penggunaan teori permainan untuk menjelaskan pengambilan keputusan politik (lihat, misalnya, Shepsle, 2006). Menurut Rhodes dkk. (2006), "Institusionalis pilihan rasional berpikir tentang institusi sebagai suatu sistem aturan dan insentif" (hlm. Xiii). Aturan-aturan ini kerap saling bersaing sehingga sejumlah aktor politik akan mendapat keuntungan atas kelompok lain. Rhodes dkk. Melanjutkan:

"Institusi dalam pengertian ini menyediakan arena-arena bagi konflik, dan upaya untuk mengubah arena-arena itu mendorong terjadinya konflik sama banyaknya jika mereka mengubah aturan permainan untuk mengubah alokasi keuntungan dan kerugian. Dari sudut pandang ini atura-aturan tak pernah netral, tetapi sebaliknya adalah pertarungan antara penantang dan pemegang kekuasaan". Hlm. xiv)³⁸

Para ahli pilihan rasional sering kali memusatkan perhatian pada suatu institusi dalam suatu kerangka waktu tertentu, meskipun semakin banyak pula yang mengkaji institusi lintas waktu.

2. *Institusionalisme Sosiologis*

Aliran ini menekankan gagasan budaya institusional. Para ahli ini memandang aturan, norma, dan struktur institusi bukan sebagai secara rasional melekat atau didikte oleh asas-asas efisiensi, melainkan dikonstruksi secara budaya. Seperti yang dikatakan oleh Hall dan Taylor

³⁸ Rhodes, R.A.W., Binder, S.A., & Rockman, B.A. (Ed). (2006). *The Oxford handbook of political institutions*. Oxford, UK: Oxford University Press.

(1996), institusionalis sosiologis beranggapan bahwa “bahkan praktik-praktik yang tampak paling birokratis sekalipun harus dijelaskan dalam konteks budaya” (hlm. 947)

3. Institusionalisme Historis

Cabang ketiga dari analisis institusionalis baru adalah institusionalisme historis yang mendapatkan perhatian besar di kalangan ilmuwan politik, khususnya mereka yang menggunakan lebih banyak metodologi kualitatif dalam mempelajari politik AS. Akan tetapi, ini juga menjadi lebih populer dalam politik komparatif dan dalam kajian hubungan internasional. Dalam hal-hal tertentu, institusionalisme historis adalah yang paling keras di antara ketiga cabang yang didefinisikan karena pendekatan ini mencakup kelompok eklektik dari ahli-ahli dengan berbagai agenda penelitian yang luas (lihat, misalnya, Lecorus, 2000; Thelen, 1999).

Meski berbeda-beda, ada beberapa konsep yang sama dalam alur penelitian ini. Seperti dikemukakan Pierson dan Skocpol (2002), dalam kelompok ahli ini, “Setiap orang tampaknya menyadari bahwa elektisisme teoritis, teknik-teknik analisis majemuk, dan penelaahan historis dan komparatif yang luas adalah pendekatan yang bisa bekerja paling baik” (hlm. 698).

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, menurut penulis bahwa teori neoinstitusionalisme adalah sebuah teori yang memandang institusi

sebagai sesuatu yang menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi tersebut berinteraksi. Namun dalam hal ini, penulis tidak menggunakan teori ini untuk melihat organisasi politik melainkan organisasi kemasyarakatan/keagamaan yang mana sebagian kadernya terjebak dalam politik praktis. Meskipun teori ini berdasar atas sebuah institusi yang membentuk perilaku individu dalam sebuah kelompok, namun penulis melihat sedikit perbedaan dengan apa yang terjadi dilapangan. Adanya permainan kepentingan yang dilakukan oleh para kader NU khususnya kepentingan politik, maka hal tersebut juga akan berpengaruh kepada eksistensi dan nama baik sebuah organisasi seperti NU. Institusi membentuk perilaku individu dalam institusi tersebut, juga akan sebaliknya akan mendapat pengaruh besar dari individu atau sekelompok orang dalam satu organisasi. Khususnya mereka yang punya pengaruh besar sebagai pengambil kebijakan. NU yang telah kembali ke khittah hanya akan menjadi perhatian dikalangan kiai dan ulama namun tidak sama halnya bagi mereka (kader NU) yang sudah terlanjur masuk perangkap politik praktis. Hal inilah yang menjadi perhatian penting dalam kaitannya dengan soliditas kader NU dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 di Kota Makassar dan juga pemilihan anggota DPRD di periode selanjutnya, bahwa jangan berpikir untuk membesarkan organisasi sebab organisasilah yang akan membesarkanmu.

2.3 Kerangka Pemikiran

Soliditas adalah kemampuan untuk mempertahankan keberadaan dan keutuhan. Kehadiran soliditas dalam organisasi sebagai sebuah sistem, oleh karena itu, akan dikaitkan dengan kapasitas atau kemampuan organisasi untuk menyatukan dan mempertahankan seluruh subsistem di dalam organisasi, yang memastikan bahwa seluruh unsur bekerja bersama untuk mencapai tujuan.

Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan bagaimana memelihara soliditas, dan pengurangan ketegangan di antara unsur dalam organisasi menjadi penting. Sebagai sebuah sistem yang terdiri dari subsistem, dalam konteks pembangunan soliditas, organisasi akan memainkan peran seperti yang disebutkan oleh Parson sebagai “integrasi”, yakni “persoalan mempertahankan soliditas di antara unit-unit, untuk kepentingan agar dapat berfungsi secara efektif”.³⁹

Kondisi seperti inilah yang tidak terlihat dalam tubuh NU. Secara umum, soliditas NU di Kota Makassar tidak begitu solid dikarenakan rasa egois dan saling mendahulukan kepentingan satu dengan yang lainnya. Kekuatan sebuah organisasi bisa terlihat dari cara mereka menjaga kesolidan antar anggota NU. Ketika soliditas mampu terjaga dengan baik, maka tujuan, visi dan misi organisasi tersebut akan berjalan dengan baik pula dan tidak tumpang tindih.

³⁹ Talcott Parsons, “Some Highlights of the General Theory of Action”, dalam Ronland Yound (ed.), *Approaches to the Study of Politics*, (Evanston: Northwestern University Press, 1962), 294.

Fenomena yang terjadi dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 di Kota Makassar yang melibatkan kader NU sebagai salah satu organisasi yang memiliki basis massa yang patut diperhitungkan, kader NU kembali aktif dalam meramaikan pemilihan ini. Diantara kader-kader NU banyak yang berminat untuk turut serta menjadi calon anggota legislatif dan beberapa diantara mereka berada dalam satu daerah pilihan (Dapil) yang sama. Sehingga kondisi inilah yang mengakibatkan terpecahnya suara dikalangan anggota NU dan warga nahdliyin.

Soliditas NU menjadi lemah karena dilema dalam memilih calon-calon legislatif yang jumlahnya relatif banyak. Kondisi seperti itu kurang baik untuk orang-orang yang berupaya memperjuangkan anggotanya terpilih sebagai anggota legislatif. Sebab suara kader NU terfragmentasi terhadap calon-calon yang berasal dari sesama kader NU lainnya. Bukan saja dari kalangan muda seperti gerakan pemuda Anshor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan pemuda NU lainnya yang ikut serta mendukung para calon-calon tertentu, tetapi dari kalangan tua, warga Nahdliyin, dan orang-orang dari struktural NU juga ikut dalam mensukseskan kemenangan calon tertentu.

Kepentingan politik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, merupakan sebuah bentuk keinginan atau kehendak yang harus dipenuhi dalam sebuah kekuasaan. Baik yang berskala Nasional, Internasional, lokal, dan kedaerahan. Sama halnya dalam memenuhi hasrat politik dalam sebuah organisasi, meskipun pada dasarnya organisasi tersebut adalah

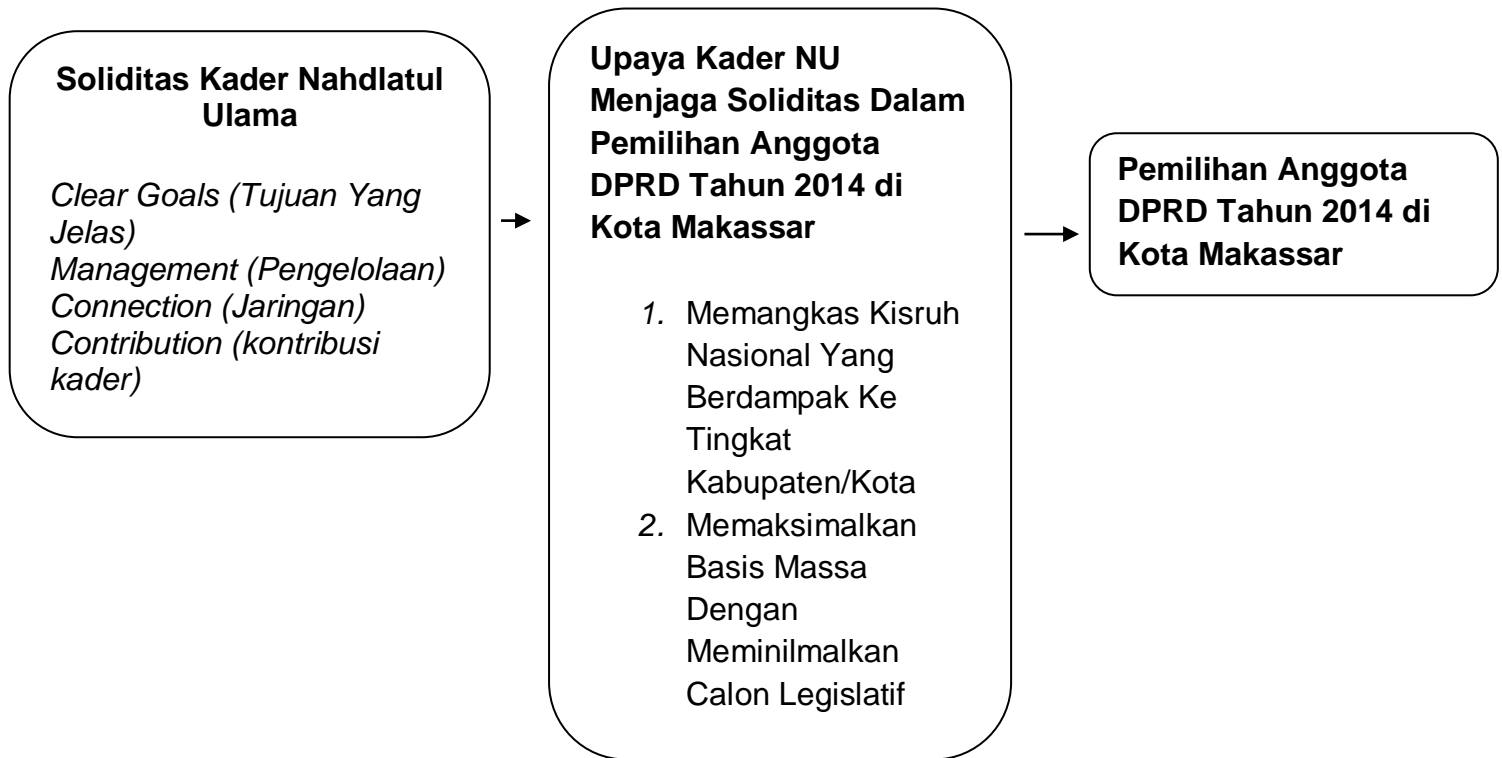
organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, tetap saja pengaruh dari sebuah kepentingan politik tidak akan pernah hilang dari hasrat para pelaku politik praktis. Netralitas politik NU adalah khittah.⁴⁰ Meskipun khittah lahir pada suasana politik yang “tidak normal” karena otoritarianisme Orde Baru, pilihan ini dianggap sebagai jalan yang paling tepat bagi NU meskipun implementasinya sangat dipengaruhi berbagai situasi politik.

Soliditas, kepentingan dan strategi yang dimiliki merupakan modal utama dalam mencapai sebuah kemenangan. Untuk mengukur kekuatan sebuah organisasi dapat dilihat dari bagaimana cara mereka membangun soliditas yang baik, sehingga mereka bisa hadir dan diterima oleh masyarakat.

Kekuatan tidak saja menjadi modal utama dalam sebuah organisasi. Begitu pula halnya dalam membangun sebuah organisasi, kesamaan pendapat, karakter, latar belakang bukanlah satu-satunya jalan untuk saling menguatkan. Akan tetapi menjaga soliditas menjadi landasan yang sangat mendasar yang harus dibangun oleh setiap kelompok, organisasi atau institusi. Ketika sebuah organisasi itu solid, maka mereka akan mampu menciptakan solidaritas yang kuat. Soliditas menjadi landasan utama yang harus dibenahi dengan sebaik-baiknya dalam sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi suatu institusi dalam menjalankan kepentingan bersama.

⁴⁰ Nahdlatul Ulama, *Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Maret 2010, hlm. 45

**Gambar. 2.1 Skema Analisa Soliditas Kader Nahdlatul Ulama Dalam
Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2014 Di Kota Makassar**



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang aspek – aspek yang terkait dengan metodologi penelitian, antara lain pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik analisis data, subyek penelitian dan keterbatasan penelitian.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Ada dua alasan bagi peneliti menetapkan Makassar sebagai lokasi penelitian; yaitu pertama, sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Makassar menjadi tempat berkumpulnya para elit dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk para kader NU, yang sangat dibutuhkan penulis untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Kedua, Kota Makassar menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat dinamika politik yang tinggi sehingga dapat lebih mudah melihat partisipasi politik masyarakat terutama kalangan NU.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif dipilih guna memperoleh pemahaman yang otentik dari pengalaman sebuah institusi yang berhubungan erat dengan topik